



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Peran JF di Bidang Keuangan Negara (JF Pengawas Keuangan Negara) dalam Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

KEMENKEU SATU

Dibawakan pada:
Sosialisasi PMK Nomor 7 Tahun 2025
Di DJPK

2025

1



- 1. Peran JF Keuangan Negara di Daerah**
- 2. Konsolidasi
Jabatan Fungsional
(JF di Bid.Keuangan Negara)**
- 3. Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
dalam JF di Bidang Keuangan Negara dan
Implementasinya**

#KEMENKEU TERPERCAYA

KEMENKEU SATU

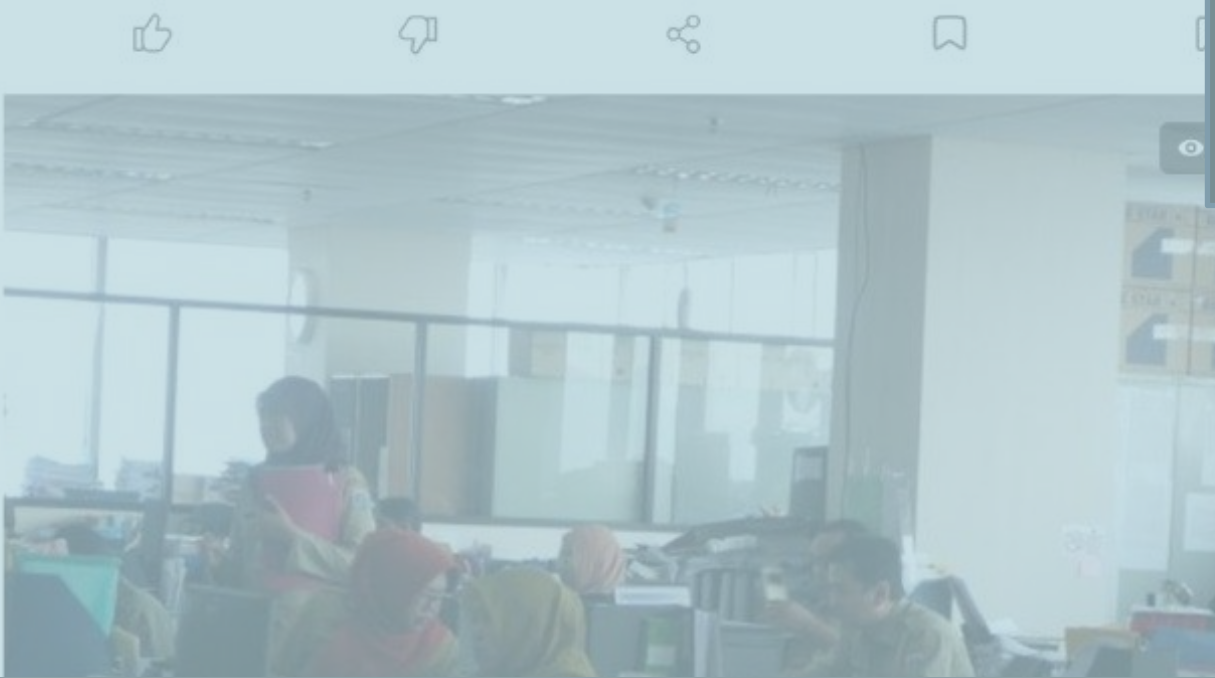


01

Peran JF KN di Lingkup Pemerintah Daerah

Tantangan Jabatan Fungsional dalam Tubuh Birokrasi

Kompas.com - 19/07/2022, 14:53 WIB



Kementerian PANRB menginisiasi Transformasi Jabatan Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL ANTARA PILIHAN DAN KEHARUSAN



25 Nov 2019 Hanapi 10108

JABATAN FUNGSIONAL ANTARA PILIHAN



““

TAU GAK SIH? #2

Pada Tahun 2023, Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan bertransformasi dari 23 JF menjadi hanya 4 JF saja



PERAN JF DI BIDANG KEUANGAN NEGARA DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAERAH



Kondisi Eksisting

Rasio PAD ke Pendapatan (PAD/Pendapatan)

Skala	Pola Hubungan	Kota/ Kabupaten	Persentase
0 - 25%	Instruktif	454	83.15%
25% - 50%	Konsultatif	72	13.19%
50% - 75%	Partisipatif	19	3.48%
75% - 100%	Delegatif	1	0.18%

Efektivitas Penerimaan PBB (PBB/PAD)

Skala	Kriteria	Kota/ Kabupaten	Persentase
0 - 10%	Sangat Kurang	374	75.86%
10,10% - 20%	Kurang	94	19.07%
20,10% - 30%	Sedang	20	4.06%
30,10% - 40%	Cukup Baik	4	0.81%
40,10% - 50%	Baik	1	0.20%
> 50%	Sangat Baik	-	-

Sumber: Portal Data APBD DJPK

Pasal 1 angka 5 Permenpan 11/2023 tentang JF di Bidang KN: Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan keuangan negara.



Kemandirian Keuangan Daerah yang Diharapkan:

1. kemampuan pemerintah daerah tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya,
2. men-*generate* pendapatan,
3. menyediakan dan memelihara kualitas layanan publik,
4. meningkatkan sumber daya keuangan, serta
5. membiayai kegiatan operasional pemerintahan secara mandiri



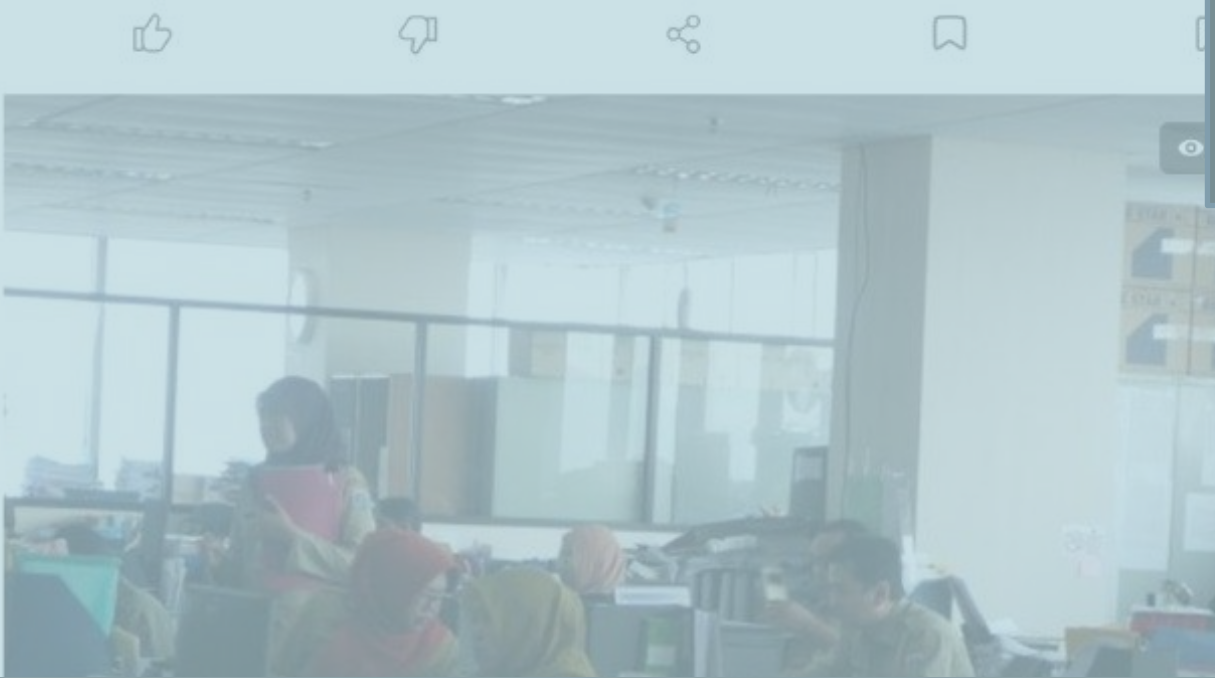
mendukung berbagai program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

02

Konsolidasi Jabatan Fungsional (JF di Bid. Keuangan Negara)

Tantangan Jabatan Fungsional dalam Tubuh Birokrasi

Kompas.com - 19/07/2022, 14:53 WIB



Kementerian PANRB menginisiasi Transformasi Jabatan Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL ANTARA PILIHAN DAN KEHARUSAN



25 Nov 2019 Hanapi 10108

JABATAN FUNGSIONAL ANTARA PILIHAN

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TAU GAK SIH? #2

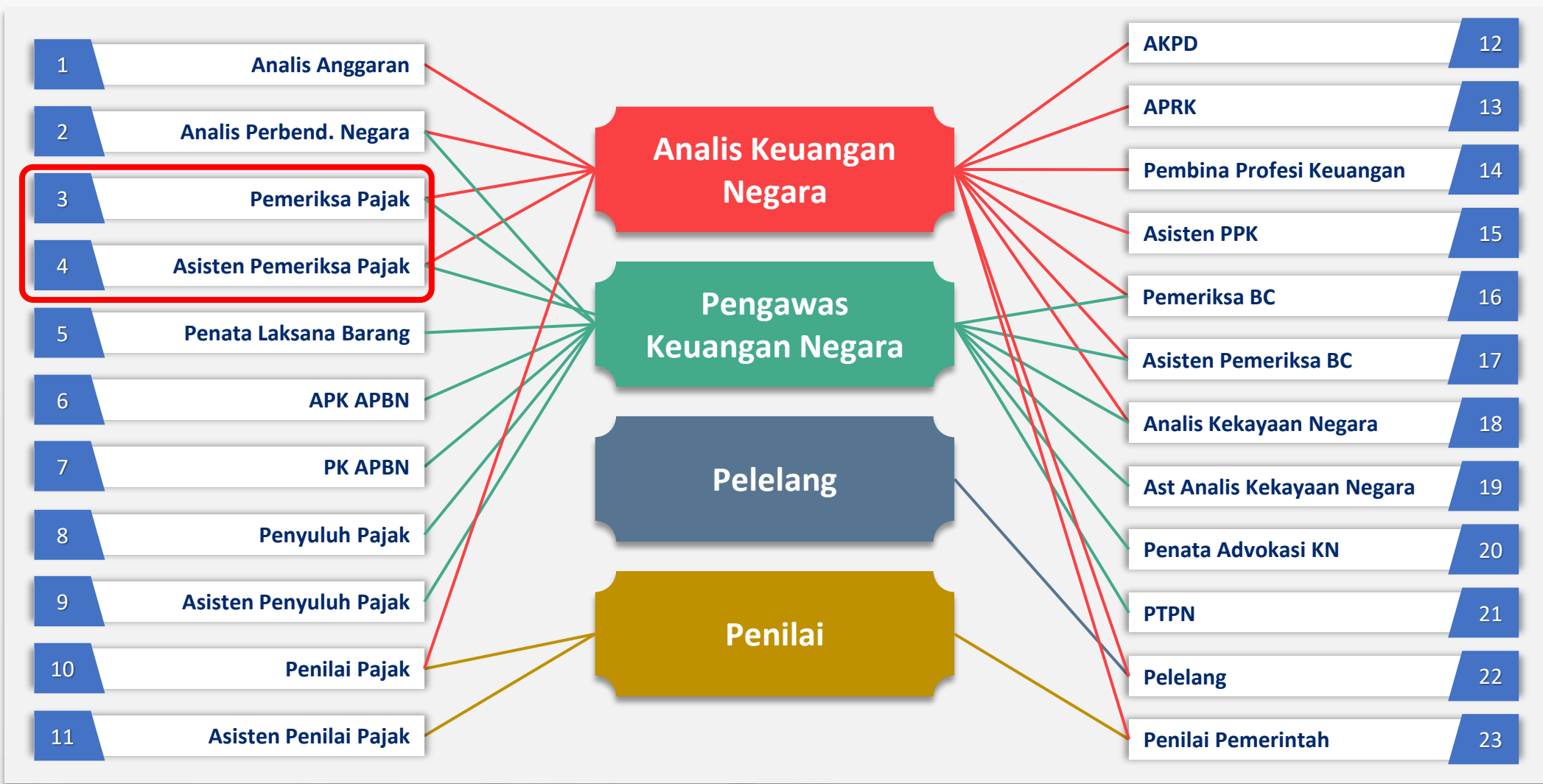
Pada Tahun 2023, Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan bertransformasi dari 23 JF menjadi hanya 4 JF saja

PEMETAAN DAN BIDANG TUGAS JF HASIL KONSOLIDASI

Pemetaan Fungsi

No	JF	Fungsi	Bidang Tugas
1	Analisis Keuangan Negara	1. Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis keuangan negara 2. Pengembangan manajemen pengetahuan	1. Fiskal dan sektor keuangan, 2. Perencanaan dan penganggaran, 3. Pajak, 4. Kepabeanan dan Cukai, 5. PNPB, 6. Perbendaharaan negara, 7. Kekayaan negara dan lelang 8. Perimbangan keuangan, 9. Pembiayaan dan risiko, 10. Pembinaan profesi keuangan, 11. Investasi pemerintah dan Pengelolaan dana,
2	Pengawas Keuangan Negara	1. Kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pelayanan teknis keuangan negara; 2. Kegiatan penyuluhan dan advokasi; 3. Pengembangan manajemen pengetahuan	1. Pajak, 2. Kepabeanan dan cukai, 3. Perbendaharaan, 4. Kekayaan Negara, 5. Perimbangan keuangan, 6. Pembiayaan, 7. Pengawasan Pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non BUMN 8. Advokasi dan penyuluhan
3	Penilai	1. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang penilaian. 2. Pengembangan manajemen pengetahuan	1. Pajak, 2. Kekayaan Negara.
4	Pelelang	1. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang lelang. 2. Pengembangan manajemen pengetahuan	1. Lelang eksekusi, 2. Lelang non eksekusi wajib, 3. Lelang non eksekusi sukarela

Plotting 23 JF ke Dalam 4 JF



Note:
Fungsi Penilaian dan Fungsi Lelang berdiri sendiri karena:
a. mekanisme kerjanya berbeda dari Analisis dan Pengawas Keuangan Negara; dan
b. Kemenkeu menyediakan layanan penilaian dan lelang yang diutamakan untuk keperluan pemerintah.

FLEKSIBILITAS PENUGASAN JF KEMENKEU

1. Fiskal dan Sektor Keuangan

2. Perencanaan dan Penganggaran

3. Pajak

4. Kepabeanan dan Cukai

5. PNPB

6. Pebendaharaan

7. Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang

8. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

9. Pembiayaan dan Resiko Keuangan

10. Pembinaan Profesi Keuangan

11. Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana

AKN

Perpindahan Antar Bidang Dalam 1 JF
Bid Keuangan Negara (Tanpa Ukom)

1. Pajak

2. Kepabeanan dan Cukai

3. Perbendaharaan

4. Kekayaan Negara

5. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

6. Pembiayaan

7. Pengawasan Pengelolaan Bagian Anggaran BUN serta BUMN dan Lembaga non BUMN

8. Advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara

PKN

Perpindahan Antar JF Bid Keuangan
Negara (Ukom Portofolio)

1. Penilaian Kekayaan Negara

2. Penilaian Pajak

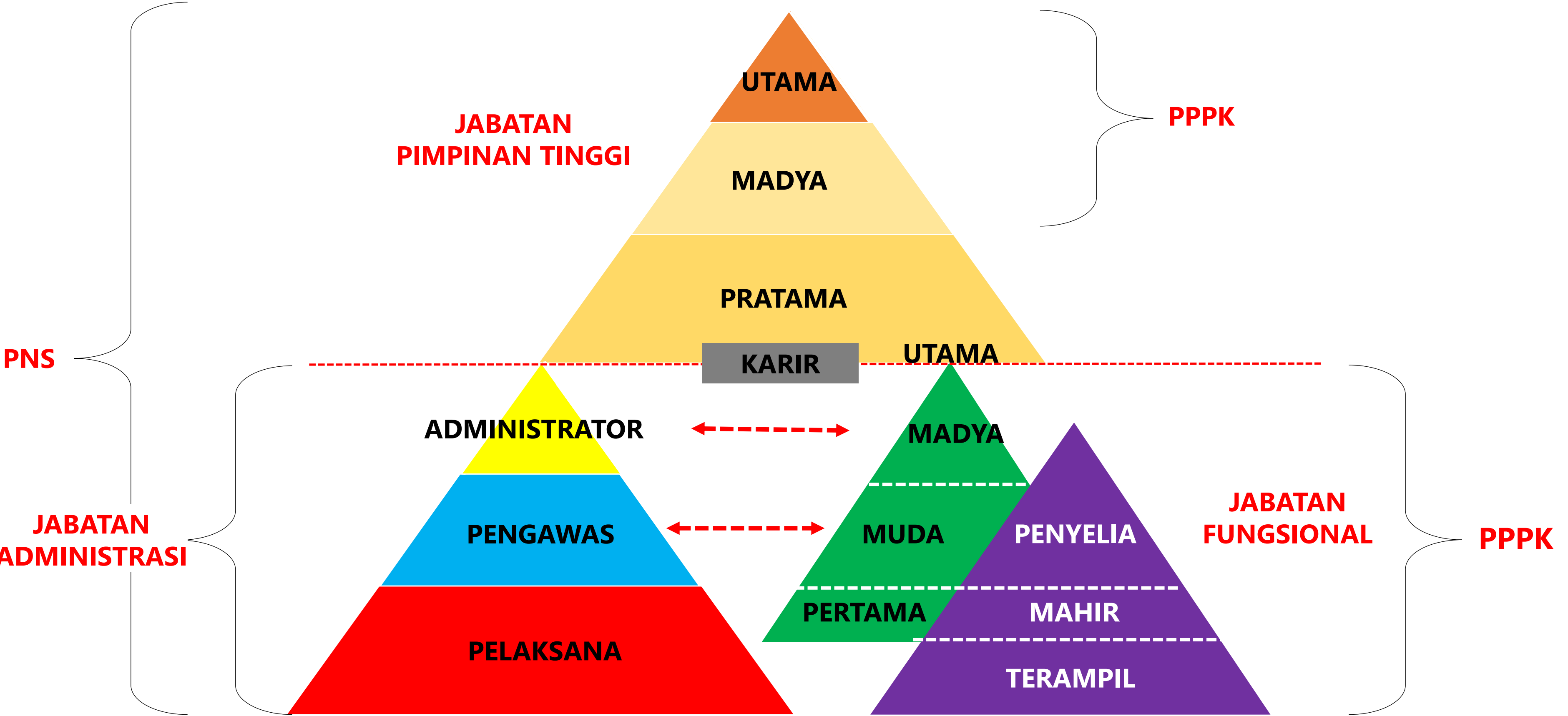
PENILAI

Lelang

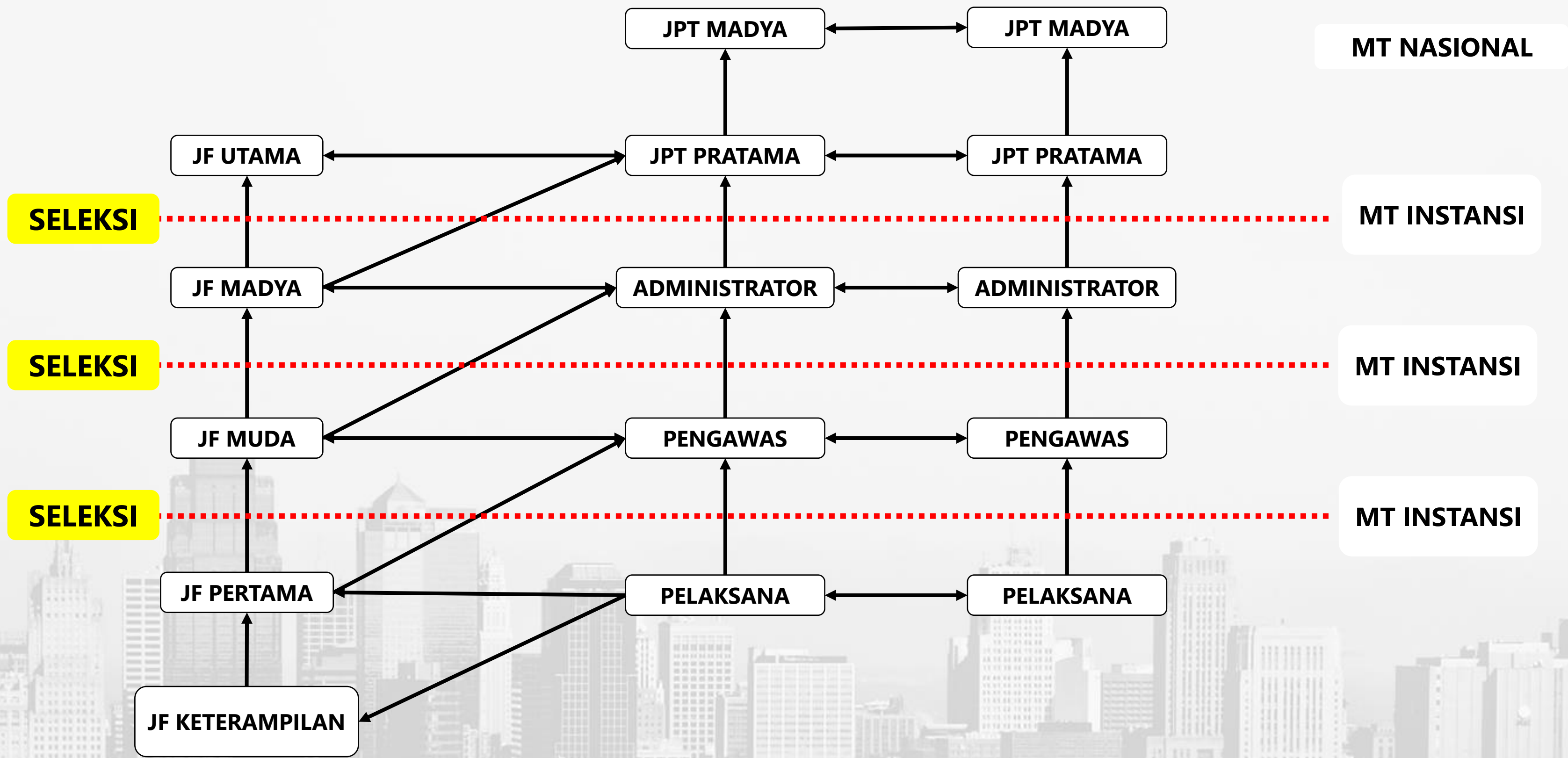
PELELANG



POLA KARIER



POLA KARIER

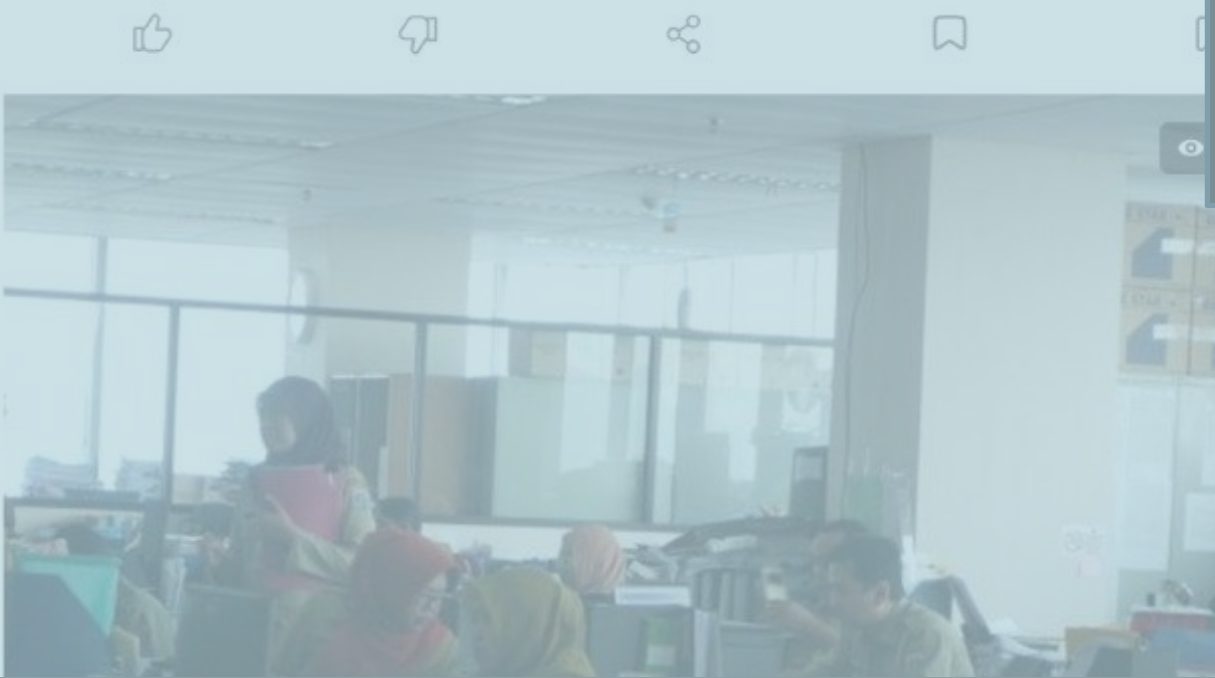


03

Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah dalam JF di Bidang Keuangan Negara dan Implementasinya

Tantangan Jabatan Fungsional dalam Tubuh Birokrasi

Kompas.com - 19/07/2022, 14:53 WIB



Kementerian PANRB menginisiasi Transformasi Jabatan Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL ANTARA PILIHAN DAN KEHARUSAN



25 Nov 2019 Hanapi 10108

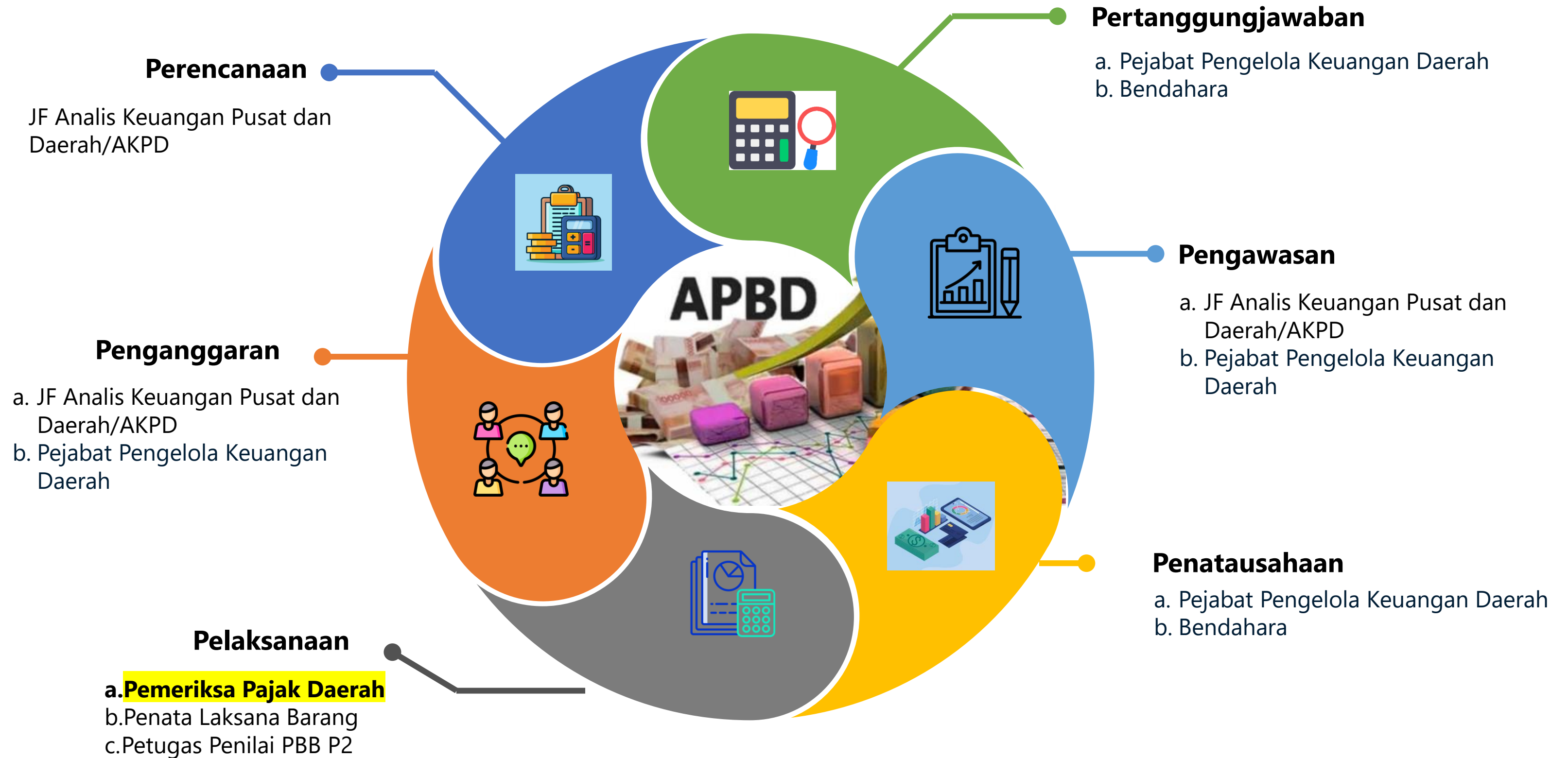
JABATAN FUNGSIONAL ANTARA PILIHAN

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TAU GAK SIH? #2

Pada Tahun 2023, Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan bertransformasi dari 23 JF menjadi hanya 4 JF saja

PERAN JF KN DALAM SIKLUS APBD



Lampiran PMK 132/2023 - Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF di Bidang Keuangan Negara

Lampiran A

Instansi Pembina

1. Fiskal dan Sektor Keuangan

2. Perencanaan dan Penganggaran

3. Pajak

4. Kepabeanan dan Cukai

5. PNB

6. Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang

7. Perbendaharaan
8. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

9. Pembiayaan dan Risiko Keuangan

10. Pembinaan Profesi Keuangan

11. Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana

1. Pajak

2. Kepabeanan dan Cukai

3. Perbendaharaan

4. Kekayaan Negara

5. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. Pembiayaan

7. Pengawasan Pengelolaan BA-BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN

8. Advokasi dan penyuluhan di bidang KN

1. Penilaian Kekayaan Negara

2. Penilaian Pajak

1. Pelelang

Lampiran B

Instansi Pusat

1. Fiskal dan Sektor Keuangan

2. Perencanaan dan Penganggaran

3. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

4. Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana

1. Perbendaharaan

2. Kekayaan Negara

1. Penilaian Kekayaan Negara

Lampiran C

Instansi Daerah

1. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2. PNB

1. Pajak

2. Perbendaharaan

3. Kekayaan Negara

1. Penilaian Kekayaan Negara

2. Penilaian Pajak



Analisis Keuangan Negara



Pengawas Keuangan Negara



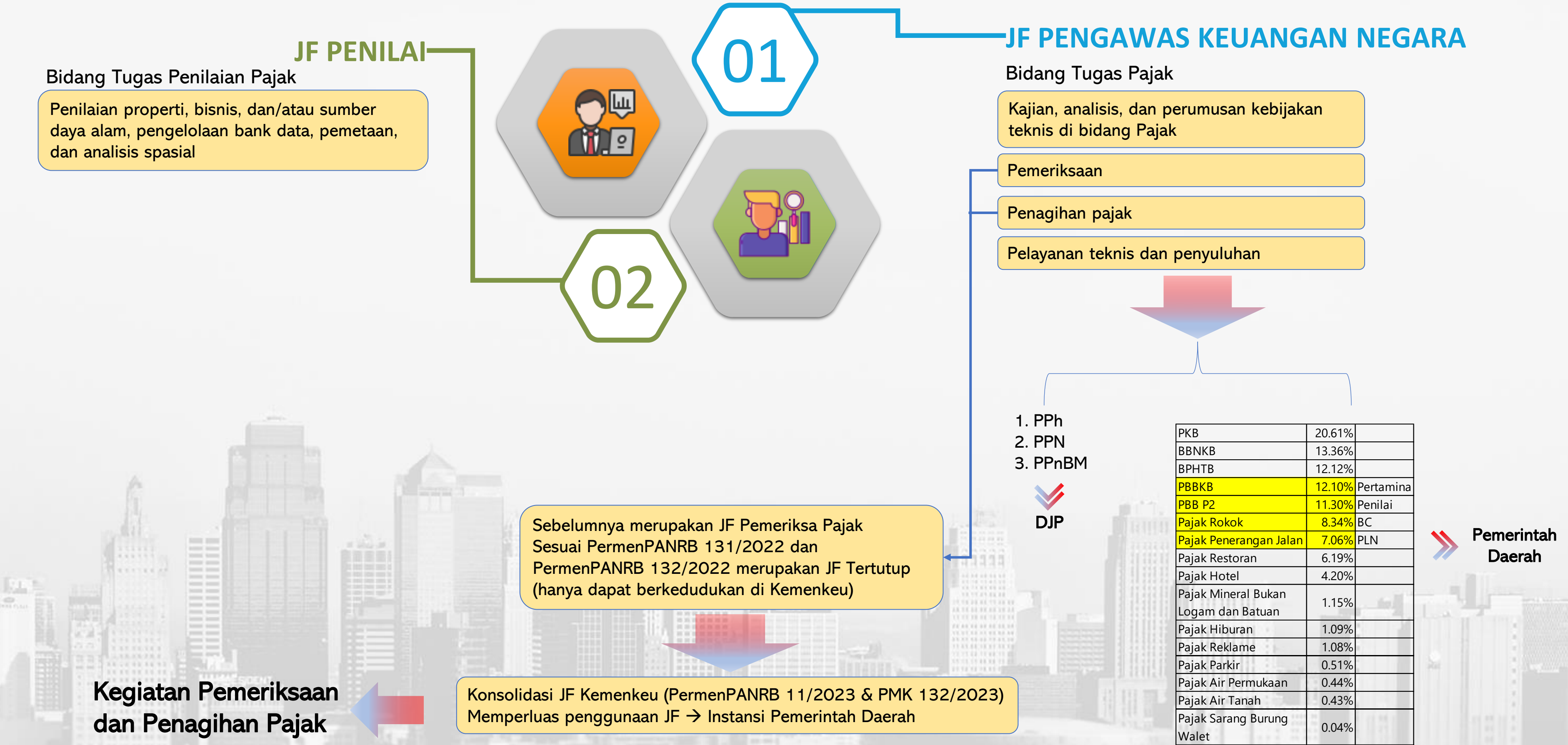
Penilai



Pelelang

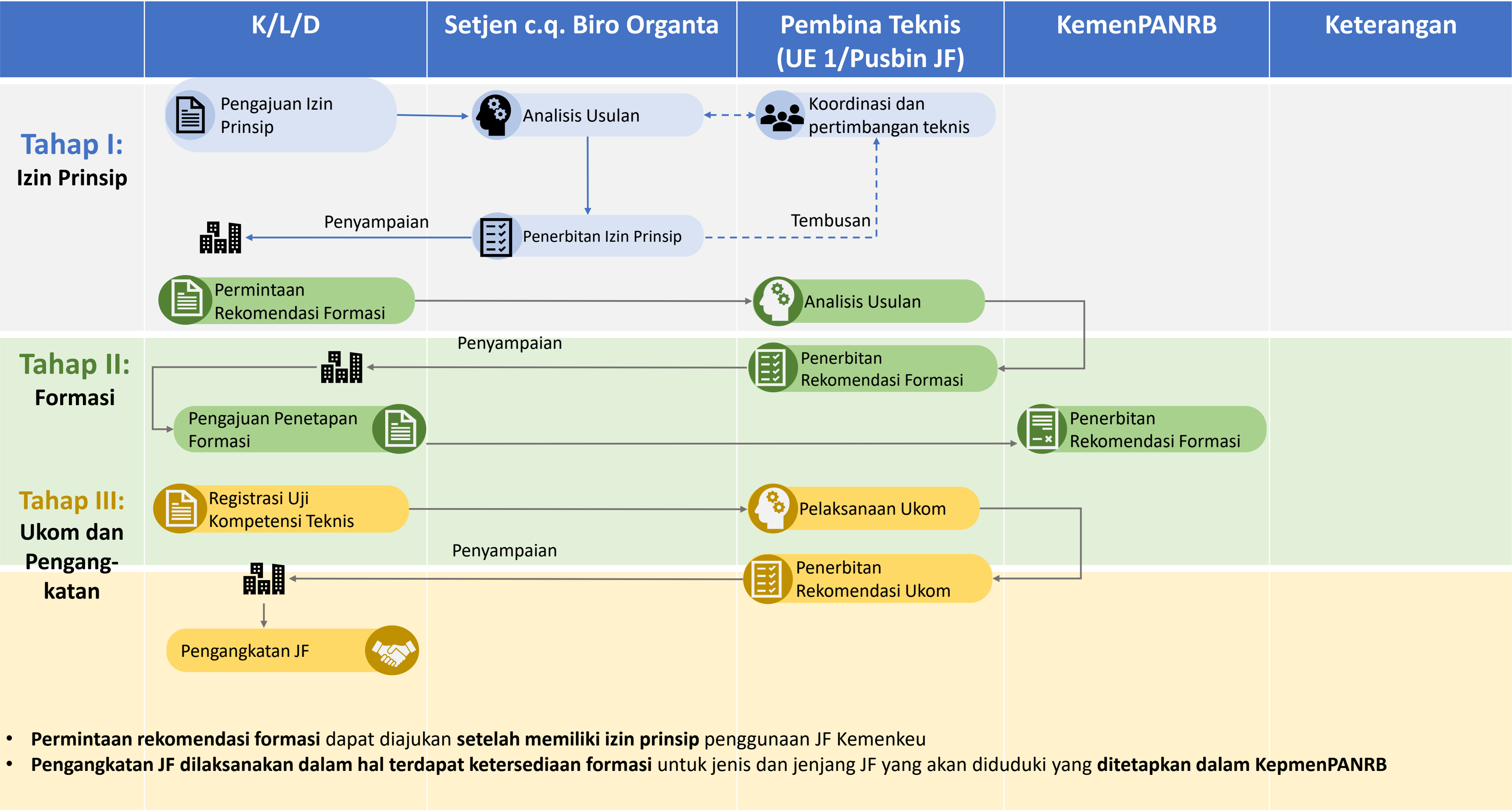
BIDANG PERPAJAKAN PADA JF DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

(Implementasi di Daerah)



ALUR PENGGUNAAN JF KEMENKEU

Dari Instansi Pemerintah Lain (Kementerian/Lembaga/Daerah)



PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JF PEMERIKSA PAJAK

RPMK Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan JF

BEFORE

- Pelaksanaan tugas JF masih rigid berdasarkan butir kegiatan
- Terdapat angka kredit di setiap butir kegiatan

A	Melakukan penilaian properti	1.	Menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti:			
		a.	Kriteria 1	daftar dokumen	0,008	Penilai Pajak Ahli Pertama
		b.	Kriteria 2	daftar dokumen	0,102	Penilai Pajak Ahli Muda
		2.	Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian properti:			
		a.	Kriteria 1	data OP dan pendukung lainnya	0,048	Penilai Pajak Ahli Pertama
		b.	Kriteria 2	data OP dan pendukung lainnya	0,340	Penilai Pajak Ahli Muda

AFTER

- Pelaksanaan tugas JF fleksibel berdasarkan bidang tugas yang dituangkan ke dalam SKP
- Angka kredit diperoleh dari konversi predikat kinerja
- Organisasi diarahkan berbasis fungsional

SKR =
$$\frac{\text{Jam Kerja Efektif}}{\sum (\text{Angka Kredit} / \text{Koefisien per Jenjang})}$$

Jumlah Kebutuhan JF =
$$\frac{\sum \text{Volume Beban Kerja} \times \text{Persentase Kontribusi}}{\text{Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)}}$$

Contoh penghitungan:

No	Cakupan Kegiatan	SKR	Persentase Kontribusi				Volume (thn)	KJF			
			Terampil	Pertama	Muda	Madya		Terampil	Pertama	Muda	Madya
1	Pemeriksaan satu jenis pajak	12,08		65,83%	25,98%	8,19%	45		3	1	
2	Produksi data hasil pemeriksaan	147,6		100%			120		1		
3	Penagihan pajak	18,51	13,17%	24,98%	61,85%		28			1	
Total Kebutuhan JF									3	2	

Catatan: *range* jumlah minimal – maksimal kebutuhan JF akan ditentukan dengan indikator keuangan daerah, misalnya jumlah penyampaian keberatan, dll

Ketentuan Umum Pengangkatan dengan Perpindahan dari Jabatan Lain

PNS

berintegritas dan bermoral baik

sehat jasmani dan rohani

golongan pangkat paling rendah III/a dan pendidikan paling rendah S-1/D-IV (Keahlian)

golongan pangkat paling rendah II/c dan pendidikan paling rendah D-III (Keterampilan)

lulus uji kompetensi

pengalaman dan penugasan bidang terkait* paling sedikit 2 (dua) tahun

nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

berusia paling tinggi 55 tahun untuk JF Ahli Madya, 53 tahun untuk selain JF Ahli Madya

formasi

UNIT PEMBINAAN JF

Unit Eselon I sebagai UPT	Jabatan Fungsional
Sekretariat Jenderal	Pembina Profesi Keuangan dan Asisten Pembina Profesi Keuangan
DJA	Analisis Anggaran
DJP	Pemeriksa Pajak, Asisten Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak
DJBC	Pemeriksa Bea dan Cukai dan Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai
DJPB	Analisis Perbendaharaan Negara, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN
DJKN	Pelelang, Penilai Pemerintah, Penata Laksana Barang, Analisis Kekayaan Negara, Pemeriksa Kekayaan Negara
DJPK	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
DJPPR	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan



Terima Kasih

**Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Sekretariat Jenderal**



KEMENKEU SATU

#KEMENKEU TERPERCAYA

